

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya perkembangan zaman, pemerintah di berbagai negara lain telah melakukan *collaborative governance* untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik atau sering kali dikenali dengan kata *good governance*. Istilah ini seringkali disebut dan dimaknai secara berlainan, bahkan menjadi konsep yang populer dalam banyak debat akademik dan politik kontemporer. Satu sisi ada yang memaknai *good governance* sebagai kinerja suatu lembaga pemerintahan, perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Istilah ini yang merujuk kepada arti asli *governing* yang berarti mengarahkan, mengendalikan, dan mempengaruhi masalah publik dalam suatu negeri. Karena itu *good governance* dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai dan bersifat mengarahkan, mengendalikan dan mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari. Konsep *good governance* ini memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis dan juga menekankan pada kesetaraan antara lembaga-lembaga negara baik yang berada di tingkat pusat, maupun daerah, sektor swasta, dan masyarakat. *Good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik tentunya berdasarkan pada pandangan dan menjadi suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara dan diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Penerapan *e-governance* diharapkan memberikan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah meningkat karena kepercayaan publik terhadap pemerintah memberikan

pengaruh yang sangat besar kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh pemerintah, produk yang dimaksud seperti kebijakan dan pelayanan. Tingkat kepercayaan publik yang tinggi mengindikasikan segala produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dengan mematuhi segala kebijakan pemerintah. Tetapi yang dihasilkan oleh pemerintah saat ini adalah penurunannya kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan, terbukti pada data yang di dapatkan sekitar 66,3% percakapan mengenai pemerintah bersitat negatif yang artinya hanya sisa 33,7% yang memiliki kepercayaan terhadap pemerintah (Imam, 2021), tentunya ini adalah konsekuensi yang mengindikasikan terhambatnya investasi, pembangunan sosial ekonomi dan kebijakan itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menurunnya rasa ketidakpercayaan ini seringkali terdengar kepada masyarakat bahwa di Indonesia hukum itu tajam ke bawah dan tumpul keatas.

Di Indonesia pemerintah pusat telah mengeluarkan payung hukum yaitu dengan adanya instruksi presiden nomor 3 yang di keluarkan pada tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang artinya pemerintah telah menyadari bahwa adanya potensi dan peluang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi kemajuan bangsa Indonesia khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien. Penerapan *e-government* dapat mendukung dan meningkatkan kinerja pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik. Saat ini *e-government* sudah dikembangkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Menurut (Al-Shehry, 2006) *e-government* masih merupakan bidang pengetahuan yang terus digali hingga saat ini dan terus di kembangkan. Beberapa para ahli juga mendefinisikan *E-Government* sebagai pelayanan

publik yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif (Clay G Weslatt, 2007). Kemudian, definisi yang hampir serupa juga disampaikan oleh *World Bank, E-Government* ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Pemerintah daerah di Indonesia juga telah menerapkan bentuk pelayanan baru berupa *e-government* (pemerintahan elektronik) dan *e-services* (pelayanan digital) yang merupakan realisasi dari penerepan *e-government* itu sendiri, Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu daerah level kabupaten yang ikut andil dalam mengimplementasikan *e-government* sebagai bentuk pelayanan publik. Meskipun baru berusia 23 tahun sebagai sebuah kabupaten, nyatanya daerah ini memiliki semangat tinggi dalam menerapkan *e-government* untuk melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kutai Timur terpilih sebagai 1 dari 100 Kota dan Kabupaten dalam Program Gerakan Menuju 100 *smart city* yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Rizal, 2018). Menurut jurnal yang ditulis oleh (Hadijah, 2020) menjelaskan beberapa instansi di Kabupaten Kutai Timur yang sudah menggunakan TIK sebagai basis pelayanannya, atau bisa dikatakan *E-Governemnet* sudah bekerja pada instansi tersebut.

Sektor Pariwisata menurut (Kemenparekraf, 2020) merupakan salah satu penyumbang devisa, PDB, dan tenaga kerja di Indonesia dan hal ini kemudian menjadi upaya yang terus dilakukan dalam pengoptimalan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Pengembangan dan pengelolaan desa wisata di Indonesia merupakan

bagian dari adanya program pengembangan pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dalam rangka percepatan kebangkitan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaku utama dengan dijalankannya desa wisata sebenarnya adalah masyarakat yang dimana ini menjadi hal utama dalam pengembangan potensi kepariwisataan di wilayah masing-masing. Desa wisata dilakukan untuk menunjukkan keaslian suatu daerah baik dari aspek social budaya, arsitektur tradisional, struktur tataruang desa, adat istiadat dan kegiatan sehari-hari masyarakat desa, serta integrase seluruh komponen pariwisata lainnya seperti akomodasi, atraksi, dan fasilitas pendukung lainnya (Zakaria, 2014) dalam (Rais Rachman, 2022). Pasokan Pariwisata tidak terlepas dari keberadaan pemangku kepentingan pariwisata (*tourism stakeholder*) yang dimana perkembangan ketergantungan desa wisata bergantung pada bagaimana peran stakeholder yang sebagian menjalankan fungsi rantai pasokan wisatawan dalam pengembangan desa wisata baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Menjalankan *collaborative government* yang terdiri dari pemerintahan daerah dan *stakeholder* tentunya menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini sebab dengan adanya *stakeholder* menjadi hal utama dalam meningkatkan pengembangan wisata dan UMKM. Penerapan *e-government* dalam mendukung terbentuknya *collaborative governance* yang baik juga pernah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dalam prinsip dasar pengembangan e-government yaitu: 1. *Reusability* yang berarti membangun sistem yang bersifat fleksibel sehingga dapat digunakan oleh pemerintah berbagai tingkat, 2. *Inform* yang berarti membangun sistem yang dapat memberikan informasi lengkap yang terstandarisasi mengenai lembaga pemerintahan maupun pemerintah daerah untuk kepentingan luas, 3. *Accelarate* yang berarti membangun sistem

yang dapat menghemat waktu dalam alur transaksi atau proses kerja rutin, 4. *Reduce* yang berarti membangun sistem yang dapat mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu (seperti fotocopy ktp, kk, dsb) memberikan transparansi biaya, serta meminimalkan kesalahan dalam transaksi atau proses pembuatan surat-surat kependudukan, 5. *Improve* yang berarti membangun sistem yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kalangan bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Kelima prinsip dasar menurut (Arianto, 2004) dalam menjalankan *e-government* ini belum sepenuhnya di implementasikan di Kabupaten Kutai Timur.

Penerapan *e-government* dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan rasa kepercayaan publik untuk menjalankan sebuah program dan system yang tentunya harus ada faktor-faktor pendukung agar program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan benar seperti adanya rasa komitmen dan kultur yang mejadi landasan dasar terbentuknya kolaborasi. *Collaboraitve governance* yang dijalankan mengikat dua elemen penting seperti pemerintah daerah, dan *stakeholder* maupun UMKM, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam pengembangan UMKM. Dinas Pariwisata merupakan salah satu dinas yang terdapat di dalam *collaborative governance* ini sebab dengan berkembangnya wisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur seharusnya mampu mendorong keberhasilan UMKM dalam mengembangkan usahanya, tidak hanya itu bahkan UMKM sebenarnya memiliki peranan penting sebagai strategis dalam upaya pengembangan sektor pariwisata sebab produk-produk yang dihasilkan akan menjadi daya tarik tersendiri dan menambah nilai daerah terutama di Kabupaten Kutai Timur.

Dinas Pariwisata Kutai Timur melihat adanya potensi pengembangan pariwisata untuk mendongkrak pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi UMKM di Kutai Timur, hal ini

terlihat bahwa memang pariwisata mempunyai peran yang sangat potensial dan strategis dalam pembangunan daerah. *Collaborative* pernah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan PT. Kaltim Prima Coal dalam perluasan pangsa pasar produk UMKM yang di tampilkan di Koresa Selatan dalam acara 14 Handarty Korea Exhibition Event 2022 yang menampilkan Produk Kuliner Sangatta (Okusa) yang dimana hal ini sudah memperlihatkan langkah positif dalam pengembangan UMKM di Kutai Timur. Selain itu, pengembangan UMKM sering dilakukan salah satunya dengan sering melakukan Expo UMKM Bangkit 2022 yang diramaikan oleh 112 UKM. Hal lain pun dikukan sebagai bentuk kepedulian stakeholder yaitu PT. Kaltim Prima Coal dengan melakukan pengembangan UMKM dan melibatkan pelaku dalam program Local Business Development (LBD) dengan menggelar workshop dan praktek langsung dalam menghadapi persoalan bisnis dari masing masing UMKM.

Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM di Kutai Timur sudah dilakukan,tetapi tidak ada perubahan yang signifikan mengenai kemajuan UMKM yang di harapkan. Oleh karena belum adanya kemajuan yang signifikan dan bagi pelaku UMKM yang ada di Kutai Timur maka peneliti bermaksud membahas mengenai rasa kepercayaan terhadap pemerintah, komitmen yang di bangun, dan kultur yang digunakan dalam melakukan kolaborasi, hal ini sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan *collaborative governance* di Kabupaten Kutai Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana *collaborative governance* yang dilakukan antara stakeholder dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur?

1.2.2 Bagaimana pengaruh *trust in government*, komitmen, dan kultur terhadap implementasi *collaborative governance* Dinas Pariwisata, UMKM, dan Stakeholder dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Menjelaskan *collaborative governance* yang dilakukan antar stakeholder di Kabupaten Kutai Timur.

1.3.2 Menjelaskan pengaruh *trust in government*, komitmen, dan kultur, terhadap implementasi *collaborative governance* Dinas Pariwisata, UMKM, dan *Stakeholder* dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Hal ini termasuk kedalam kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan, komitmen, kultur dalam menjalankan *collaborative governance* untuk memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur oleh Dinas Pariwisata dengan *Stakeholder* dan UMKM di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, terkhusus lagi pada kajian keilmuan yang berkaitan dengan implementasi *collaborative governance* dan kepercayaan terhadap pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat dalam membantu pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dan menjadi bahan dalam mengimplementasikan *collaborative governance* dalam membangun UMKM berkemajuan tahun 2022 di Kabupaten Kutai Timur.

1.5 Kajian Pustaka (*liteture review*)

Studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap pemerintah sekaligus pengimplementasian *collaborative governance* melalui Dinas Pariwisata, UMKM, dan Stakeholder di Indonesia dapat dipetakan/dikategorikan/diklasifikasikan (taksonomi) sebagai berikut:

- 1) Pada penelitian yang di buat oleh (Sirajuddin & Atrianingsi, 2020), di dalam penelitian ini membahas mengenai *trust in goverment* atau kepercayaan kepada pemerintah di Kota Makassar tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merupakan kepercayaan yang sebagian besar di dasarkan pada karakteristik trustor (*disposition to trust*), asumsi yang dibuat mengenai sifat trustee (*trust of the goverment*), dan faktor institusional (*trust of the internet*). Berbeda dengan penelitian dari Siajuddin & Antriningi (2020) yang hanya menjelaskan kepercayaan public dengan adanya pelayanan digital dari e-mobile Jaminan Kesehatan Nasional di kota Makasar. Pada penelitian ini menambah perspektif yang tidak hanya dilihat dari kepercayaan masyarakat tetapi juga berusaha menjelaskan bagaiman kultur atau perubahan budaya dari stageholder pemerintah dan masyarakat, termasuk juga bagaimana menjelaskan partisipasi dari masyarakat.
- 2) Penelitian terkait dengan peningkatan kepercayaan publik juga dilakukan oleh Putra (2018) yang mana tulisannya berusaha mengukur peningkatan kepercayaan public melalui pemerintahan partisipatif. Penelitian Putra (2018) menggunakan studi kasus pada pelaksanaan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Manajemen Inovasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik. Hasil

kesimpulan dari penelitiannya menunjukkan karakteristik pemerintahan Bojonegoro sudah cukup mencerminkan pemerintahan partisipatif. Hal tersebut ditunjukkan dari bagaimana pemerintah memiliki focus dalam memberikan arahan dan, mengundang masyarakat untuk berpartisipasi. Pemerintah Bojonegoro memberikan ruang dialog public pada hari jumat dan disiarkan langsung melalui saluran radio, selain itu juga memberikan pelayanan pelaporan atau pengaduan untuk aspirasi dari masyarakat secara online. Dalam penelitiannya Putra (2018) tidak menjelaskan bagaimana keterlibatan dinas-dinas selaku bagian pemerintahan. Sementara pada peneliti ini peneliti berusaha menjelaskan keterkaitan atau hubungan partisipasi yang juga melibatkan dinas dan masyarakat.

- 3) Penelitian mengenai kolaborasi antar *stakeholders* juga pernah ditulis oleh (Ardianto & Asngadi, 2022) yang hasilnya penelitian ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis berupa kolaborasi dan skema bisnis melalui kolaborasi antar pihak yang berkepentingan dalam memberikan ruang ekspor bagi UMKM agar dapat menjadikan UMKM yang merdeka untuk tetap bertahan dan bersaing pada masa pemulihan ekonomi. Di dalam penelitian ini juga menekankan agar UMKM dapat scali up dimasa pemulihan ekonomi melalui transformasi ekonomi dan merubah klasifikasi sebagai model baru UMKM, sinergi antar stakeholder melalui pengintegritegrasian pola pembiayaan dan kemampuan usaha yang diharapkan juga dapat membantu mendorong UMKM untuk lebih berkembang di pasar global (ekspor). Hampir serupa dengan penelitian dari (Ardianto & Asngadi, 2022) yang menjelaskan kolaborasi antar stakeholder. Meskipun demikian terdapat perbedaan dengan penelitian ini yang tidak hanya

merumuskan langkah strategi kolaborasi tetapi lebih melihat dan menjelaskan kolaborasi apa yang dilakukan berdasarkan kepercayaan, komitmen dan kultur antar stakeholder untuk kemajuan UMKM.

- 4) Penelitian yang berkaitan dengan kolaborasi pemerintahan untuk memajukan UMKM juga ditulis oleh (Syakinah, 2022) yang berjudul Corporate Social Responsibility Kemitraan PT Perkebunan Nusantara 3 (Persero) dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dalam Pengembangan UMKM di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemitraan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara dengan PTPN 3 (Persero) dalam pengembangan UMKM di Kota Medan. Dari penelitian ini juga membahas bahwa UMKM merupakan penopang perekonomian nasional karena UMKM dapat menyerap 89,17 persen tenaga kerja dalam negeri dan hal ini dilihat perlunya dan pentingnya memberikan perhatian penuh kepada UMKM untuk terus berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh (Syakinah, 2022) ini hanya menjelaskan kepentingan UMKM demi terciptanya lapangan pekerjaan. Meskipun penelitian yang dilakukan (Syakinah, 2022) menjelaskan dampak positif dengan kehadirannya UMKM, namun berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai cara apa dalam memajukan UMKM dengan adanya kolaborasi antar stakeholders yang dilakukan.
- 5) Penelitian tentang variabel komitmen juga sempat dilakukan oleh Agustina dan Rodiyah (2018). Dalam penelitiannya Agustina dan Rodiyah berusaha mengkaji lebih lanjut tentang keseriusan dan komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan ekowisata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang

dilakukan atau keseriusan pemerintah Sidoarjo dalam mewujudkan ekowisata dalam bentuk geopark belum optimal. Pada penelitian Agustina dan Rodiyah juga menjelaskan bahwa tidak kerjasama yang baik antara pemerintah dengan stakeholder menyebabkan program tidak berjalan maksimal. Agustina dan Rodiyah (2018) menjelaskan hasil penelitiannya dari kaca mata governance, sementara pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan collaborative governance, yang mana diluar pemangku kebijakan juga berperan penting dalam sukses atau tidaknya suatu kebijakan.

- 6) Syafrina (2019) juga sempat membahas terkait dengan komitmen pemerintah dengan judul Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam Mengatasi Masalah Stunting Berdasarkan Nutrition Commitment Index 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan belum maksimalnya kebijakan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang dilihat dari target capaian yang tidak memenuhi. Meskipun cukup menarik pemaparan dari Syafrina, (2019) namun penelitiannya berangkat dari kaca mata atau rumpun kesehatan. Sementara pada penelitian ini berusaha menjelaskan lebih dalam dari sisi hubungan pemerintah dengan stakeholder atau pihak lain di luar pemerintah.
- 7) Penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati, 2022) yang membahas tentang Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Dunia Usaha Dalam Mengembangkan Produk UMKM, penelitian ini dilakukan karena saat terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia yang berdampak cukup parah tidak hanya pada masalah kesehatan tetapi salah satu dampak yang terkena adalah perekonomian terutama pada UMKM sehingga dirasa perlunya kerjasama yang dilakukan dari berbagai pihak untuk

memulihkan kondisi UMKM, diantaranya dari dunia pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati, 2022) ini tentu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini membahas kolaborasi jangka panjang yang dilakukan oleh stakeholders dalam memajukan UMKM.

- 8) Penelitian yang dilakukan oleh (Anugrah & Wahyono, 2021) yang membahas tentang Communal Marketplace Berbasis Koperasi sebagai Salah Satu Trobosan Inovasi bagi Pelaku UMKM Indonesia di Masa Pandemi Covid-19, penelitian ini dilakukan saat terjadinya pademi covid-19 yang menimpa Indonesia dan berdampak pada banyak sektor terutama pada UMKM yang ada di Indonesia, uniknya di penelitian ini memberikan inovasi baru bagi UMKM dalam membuat Marketplace agar bisa melakukan promosi digital. Hal ini dilakukan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi dengan menciptakan marketplace untuk UMKM yang diharapkan dapat melawati tantangan tekanan dari adanya pandemi covid-19. Meskipun penelitian ini adalah bentuk inovasi bagi UMKM tetapi di dalam penelitian ini hanya menjelaskan bentuk seperti apa inovasi yang diberikan dari hasil kolaborasi dan berbeda dengan penelitian ini yang juga membahas kolaborasi tapi melibatkan rasa kepercayaan, komitmen, dan kultur yang dijalankan agar adanya kemajuan bagi UMKM di Kutai Timur khususnya.
- 9) Penelitian yang dilakukan oleh (Abidin, 2021) yang membahas tentang Lokakarya Penguatan Kolaborasi Antar Lembaga Pelayanan Pendampingan untuk UMKM di Indonesia, yang bertujuan untuk mengenalkan penyedia pendampingan bismis sebagai mitra potensial dalam pembangunan UMKM, kemudian penulis juga mengidentifikasi dan mengeksplorasi keuntungan dan tantangan membangun

kemintraan dengan lembaga penyedia pendamping bisnis dan juga membahas mengenai upaya atau skema kolaborasi pemerintahan dengan lembaga penyedia pendampingan bisnis. Meskipun demikian penelitian yang ditulis oleh (Abidin, 2021) ini hanya membahas kolaborasi dalam melakukan pelatihan saja.

10) Penelitian yang ditulis oleh (Faidati & Muthmainah, 2018) yang berjudul *Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri* yang bertujuan untuk mengkaji ruang lingkup dari kolaborasi dalam memperkuat posisi pelaku usaha kecil dan menengah dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di wilayah DIY. Hasil penelitiannya untuk membantu pengembangan pelaku UMKM di DIY dalam proses adaptasi dan mempercepat pelaku UMKM dalam merespon revolusi industri 4.0 yang perlu dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, koperasi, maupun civil society. Akan tetapi, penelitian tersebut mengalami kendala dalam melakukannya yaitu karena masih adanya tumpang tindih program serta kelompok sasaran.

Namun demikian studi-studi dan penelitian-penelitian terdahulu itu kurang dalam memperhatikan *Trust in Government*, Komitmen, dan Kultur yang ada dalam melaksanakan *collaborative governance*, seperti yang dikatakan oleh (Juli & Octaviani, 2022) di dalam jurnalnya, *Collaborative governance* dilakukan untuk mengatur lembaga publik yang terlibat secara langsung dengan pemangku kebijakan non publik dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bertujuan untuk mengelola aset publik maupun mengimplementasikan kebijakan publik. *Collaborative governance* yang di bangun seharusnya terdapat nilai kepercayaan, komitmen, dan kultur antar stakeholders.

Penelitian saya tentunya berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain karena di dalam penelitian saya ini membahas *collaborative governance* Pemerintah dengan *stakeholders* dan UMKM yang menekankan rasa kepercayaan, komitmen, dan kultur sehingga penelitian ini berfokus proses terbentuknya *collaborative governance* Dinas Pariwisata dengan Stakeholder dan UMKM dalam memajukan UMKM yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Kepercayaan Publik

1. Pengertian Kepercayaan Publik

Pada dasarnya tidak ada pendefinisian yang mutlak menjelaskan terkait dengan kepercayaan publik, meski demikian kepercayaan merupakan sebuah karakteristik yang mana kepercayaan itu sendiri menentukan karakteristik yang dirasakan (Andhika, 2018). Hubungan kepercayaan publik antara masyarakat dengan pemerintah muncul akibat dari adanya hubungan dengan pemerintah atau organisasi. Umumnya, Ketika terdapat kebijakan baru pemerintah yang diumumkan akan memunculkan rasa kepercayaan atau ketidakpercayaan publik pada pemerintah. Fukuyama (1995) menjelaskan bahwa kepercayaan public terhadap pemerintah menjadi cara efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Begitupula sebaliknya, ketidakpercayaan publik kepada pemerintah dapat menghambat banyak program pemerintah dan hal yang terparahnya menimbulkan sebuah *chaos* atau kekacauan.

Banyak istilah dalam menjelaskan sebuah kepercayaan, seperti *condiment*, *reliability*, dan *trustworthiness* (Dwiyanto, 2011). Perbedaan istilah tersebut merupakan hal yang wajar karena terdapat perbedaan sudut pandang dan fenomena yang terjadi, dimana

pada dasarnya kepercayaan publik bersifat multidimensional dan menjadi subjek dari berbagai disiplin ilmu. Dari mulai psikologi, sosiologi, politik, ekonomi, maupun administrasi publik.

Beberapa pandangan dari ahli dalam menjelaskan terkait dengan kepercayaan seperti Blind (2006) yang menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan sebuah interpersonal kompleks dan bersifat abstrak yang berhubungan dengan organisasi. Sementara dari sisi psikologi kepercayaan diartikan sebagai sebuah proses kognitif internal dari orang yang mempercayai dan dipercayai (Dwiyanto, 2011). Dwiyanto menjelaskan kepercayaan public dari kacamata ekonomi yang memandang kepercayaan cenderung dilihat dari harapan yang bersifat kalkulatif dan rasional terhadap hasil yang diberikan oleh suatu organisasi.

Kepercayaan public adalah hal yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi public yang sah (Mardiyanta, 2013). Cheema (2010) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan konsep yang bersifat multifaset, dimana hal tersebut menyangkut consensus dasar diantara anggota masyarakat berdasarkan nilai-nilai kolektif, prioritas, dan penerimaan maupun perbedaan implisit masyarakat. Cheema juga menambahkan dalam aspek kepercayaan yang mengacu pada kepercayaan terhadap pemerintah, pemerintah harus menjalin Kerjasama Bersama pemangku kepentingan yang terkait dalam mengelola pandangan warganya. Kegagalan pemerintah ketika tidak mampu untuk mengelola dan mewujudkan harapan dari masyarakat maka akan merusak kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai macam penjelasan di atas dapat ditarik hasil bahwa kepercayaan dapat diartikan sebagai sebuah sikap abstrak yang terbentuk akibat hubungan pemerintah kepada masyarakat.

2. Bentuk Kepercayaan

Dari penjelasan Blind (2006) yang dikutip oleh Putra (2018) kepercayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kepercayaan politik (*political trust*) dan kepercayaan sosial (*social trust*). Beberapa penjelasan bentuk kepercayaan (Putra, 2018):

a. Kepercayaan politik yaitu kepercayaan yang terjadi dalam bentuk politik. Putra menjelaskan kepercayaan politik itu terjadi ketika masyarakat menilai pemerintahan dan institusinya, yang mana secara umum pembuatan kebijakan melalui tokoh-tokoh politiknya secara individu memberikan sebuah janji kepada masyarakat yang kemudian dipercayai oleh masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah dan para pejabat publik karena dinilai mampu mengurus kepentingan masyarakat.

b. Kepercayaan sosial (*Social Trust*)

Kepercayaan sosial adalah kepercayaan yang merujuk pada masyarakat saling percaya antar anggota komunitas sosial satu dengan yang lainnya (Putra, 2018). Putra juga menambahkan kepercayaan sosial dapat dideskripsikan seperti ketika masyarakat percaya bahwa tetangganya merupakan orang yang baik yang akan selalu ikut menjaga harta bendanya selama mereka meninggalkan rumah. Hal tersebut merupakan sebuah contoh masyarakat memiliki kepercayaan sosial yang menjadikan dirinya merasa aman, tenang dan nyaman walau rumah dan harta bendanya sedang ditinggalkan.

3. Indikator *Trust in Government*

Dari perspektif sosiologi kepercayaan publik adalah suatu konsep yang bersifat multidimensional. Multidimensional tersebut terbagi menjadi tiga yaitu (Dwiyanto, 2011) :

a. Pemerintah yang berinteraksi dengan masyarakat

Indikator Pemerintah yang bersifat demokratis dapat dikategorikan kedalam dimensi kognisi yang dimana pada dimensi ini masyarakat senantiasa meletakkan kepercayaannya terhadap pemerintah, yang mana mereka dapat terlibat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hubungan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah yang intens akan membentuk *cognitive knowledge* yang positif. Intensitas yang cukup baik dapat terjadi ketika pemerintah atau pejabat pemangku kepentingan bersifat terbuka, akses informasi yang mudah, dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. Berman (1996) dan Hardin (1998) menyatakan hal yang serupa, disaat masyarakat percaya kepada pemerintah, maka tindakan tersebut merupakan keputusan kognitif (Putra, 2018). Bagi masyarakat yang memiliki intensitas yang rendah mereka akan tetap memperoleh *cognitive knowledge* yang didapatkannya melalui afiliasi politiknya, sosialisasi, dan juga dapat diperoleh karena status sosial ekonomi yang tinggi (Putra, 2018).

b. Pemerintah merespon kebutuhan rakyat

Indikator Pemerintah merespon kebutuhan rakyat dapat dikategorikan sebagai dimensi perilaku yang dimana pada dimensi perilaku ini kepercayaan public

merujuk pada penilaian terhadap perilaku pemerintah dan para pejabatnya. Penilaian masyarakat kepada pejabat atau pemerintah dapat mencakup tiga hal diantaranya (Putra, 2018):

- a) Kepedulian pemerintah dan para pejabatnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b) Kemampuan pemerintah dan para pejabatnya dalam mengelola kepentingan masyarakat.
- c) Tanggung jawab pemerintah dan para pejabatnya dalam mewujudkan janjinya.

c. Pemerintah menyampaikan informasi yang benar

Indikator Pemerintah menyampaikan informasi yang benar ini bisa dikategorikan masuk ke dalam dimensi efeksi yang dimana dimensi ini berkaitan dengan hubungan emosional, dimana kepercayaan public diperoleh melalui hubungan emosional antara masyarakat dengan pemerintah dan para pejabatnya. Kondisi ini dapat muncul ketika ada masyarakat dan pejabat pemerintah melakukan kegiatan interaktif dan partisipatif antar keduanya. Semakin sering hubungan antara keduanya akan memunculkan *emotional attachment* dengan pemerintah dan kebijakannya. Emosional akan timbul semakin kuat dan baik Ketika para pemangku kebijakan senantiasa melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh masyarakat.

1.6.2 Komitmen

1. Pengertian Komitmen

Dalam Mauna & Safitri (2015), Meyer dan Allen mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan ciri hubungan seorang pekerja dengan perusahaan dan berdampak pada keputusan untuk tetap menjadi anggota suatu perusahaan. Meyer dan Allen dalam Mauna & Safitri (2015) juga menambahkan komitmen sebagai keterikatan emosional, identifikasi pribadi dengan organisasi, dan keinginan untuk terus menjadi anggota organisasi. Tingkat pengorbanan karyawan di dalam organisasi juga terkait dengan komitmen, yang tidak hanya terkait dengan pergantian karyawan.

Pengertian komitmen ini juga dikemukakan oleh Zurnali, menurutnya komitmen adalah emosi yang kuat dan intim dari seseorang terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dalam kaitannya dengan perannya dalam mencapai tujuan dan nilai tersebut (Zurnali,2010).

Sementara menurut Luthans (1992), komitmen organisasi didefinisikan sebagai : Pertama, yaitu keinginan kuat untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kedua, tingkat kemauan yang tinggi untuk bekerja untuk organisasi. Ketiga tingkat penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Dari kaca mata organisasi pemerintah, Hunt and Morgan (1994) menjelaskan karyawan dikatakan memiliki komitmen organisasi yang tinggi apabila:

- a. memiliki keyakinan dan menerima tujuan dan nilai-nilai organisasi.
- b. Bercita-cita untuk bekerja keras untuk memenuhi tujuan organisasi
- c. Benar-benar termotivasi untuk terus eksis sebagai anggota organisasi.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen karyawan terhadap suatu organisasi merupakan suatu perasaan kepemilikan yang dimiliki

oleh karyawan yang memotivasi mereka untuk tetap setia pada perusahaan guna memajukan tujuan, misi, dan visi organisasi dan mencegah mereka berhenti karena alasan apa pun.

2. Bentuk Komitmen Pegawai/Karyawan

Marianti (2014) mengutip dari Mayer dan Allen untuk menjelaskan beberapa Indikator komitmen :

a. Emosi yang Kuat Menjadi Bagian dari Program Kolaborasi

Indikator Perasaan sebagai bagian dari kolaborasi ini dapat dikategorikan dalam komitmen afektif yang dimana komitmen ini mengacu pada sejauh mana setiap orang mengidentifikasi dan terlibat dengan perusahaan (dalam penelitian ini pemerintah). Komitmen afektif yang tinggi karyawan akan bertahan sebagai anggota perusahaan karena mereka benar-benar ingin dan puas dengan partisipasi mereka.

b. Kontribusi untuk Program Kolaborasi

Indikator Kontribusi untuk program kolaborasi dapat dikategorikan kedalam komitmen normatif (*Normative Commitment*) yang dimana hal ini berkaitan dengan adanya perasaan wajib pada diri karyawan untuk terus bekerja dalam organisasi, sehingga karyawan dengan tingkat komitmen normatif yang tinggi merasa harus (*ought to*) bertahan di organisasi, komitmen ini jelas merupakan kontribusi yang dilakukan untuk menjalankan program.

c. Partisipasi dalam Penyelesaian Masalah dalam Program Kolaborasi

Indikator Partisipasi dalam penyelesaian masalah dalam program kolaborasi ini dapat dikaitkan dengan komitmen berkelanjutan (*Continuance Commitment*)

karena hal ini terkait dengan pertimbangan untung rugi jika karyawan meninggalkan organisasi. Komitmen ini merefleksikan besarnya biaya yang harus ditanggung dan apa yang harus dikorbankan jika meninggalkan organisasi, sehingga segala sesuatu yang dapat meningkatkan biaya dapat dianggap sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap komitmen berkelanjutan, komitmen ini adalah sebagai salah satu partisipasi dalam program kolaborasi dalam menyelesaikan masalah.

1.6.3 Kultur (Budaya Kerja)

Budaya merupakan suatu hal yang menjadi sebuah kebiasaan atau dilakukan terus menerus. Menurut Widagdho (2004) dalam Indrawan (2017) budaya sebagai suatu perkembangan dari bahasa sansekerta 'budhayah' yaitu merupakan bentuk jamak dari akal budhi, dan kata majemuk budi-daya, yang berarti daya dari budi, atau dalam pengertian lain budaya adalah daya dari budi yaitu hasil dari cipta, karsa, dan rasa. Sementara budaya kerja seperti yang diungkap oleh Nawawi (2003) adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi. Nawawi juga menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kebiasaan dalam budaya kerja tidak ada sanksi yang tegas, tetapi dari para pegawai atau karyawan secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan suatu yang harus ditaati dalam upaya mencapai tujuan (Indrawan, 2017).

Dalam pandangan Amnuhai (2003) untuk memperbaiki sebuah budaya kerja dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubahnya, hal tersebut memerlukan adanya pembenahan-pembenahan dimulai dari sikap dan tingkah laku para pemimpinnya kemudian akan diikuti oleh para bawahannya. Pada saat yang bersamaan maka akan timbul kesadaran

yang merambat dari pemimpinnya kemudian bawahnya sehingga membentuk sebuah cara kerja baru secara kesatuan. Menurut (Habibiarifin, 2015) dalam (Ii & Kerja, 2016) yang menjelaskan konseptual budaya kerja secara tekstual digambarkan sebagai berikut;

1. Norma Kultural/Adat Mendukung Kolaborasi

Norma kultural yang tertanam dalam diri yaitu gotong royong hal ini kemudian dapat dikatakan bahwa kebersamaan dan dinamika kelompok dapat mendorong agar cara kerjanya tidak bersifat individual dan pusat kekuasaan tidak pada satu tangan. Selain gotong royong Menurut (Moekijat, 2006) di (Ii & Kerja, 2016) Norma kultural yang mendukung dalam melakukan kolaborasi seperti adanya sikap Disiplin, Keterbukaan, dan saling menghargai.

2. Sikap dan Perilaku Orang Indonesia Mendukung Kolaborasi

Sikap dan perilaku orang Indonesia yang tidak lepas menurut Taliziduhu Ndraha di (Ii & Kerja, 2016) yang menjelaskan sikap atau perilaku pada waktu bekerja seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan kewajibannya, suka membantu sesama pegawai, atau sebaliknya. Hal ini kemudian menjadi sikap atau perilaku orang Indonesia yang akan mendukung kolaborasi yang akan dilakukan.

1.6.4 Collaborative Governance

Collaborative governance adalah sebuah bentuk terhadap pengertian dari 'governance' atau pengertian pemerintah secara tradisional yang diungkapkan oleh Lynn, Heinrich, and Hill (2001, 7) yang mana melakukan konstruksi paham pemerintahan secara tradisional sebagai *'regimes of laws, rules, judicial decisions, and administrative*

practices that constrain, prescribe, and enable the provision of publicly supported goods and services'' (Ansell & Gash, 2007). Ansell dan Gash (2007) menambahkan bahwa definisi tersebut memberikan ruang bagi pemerintahan tradisional struktur serta bentuk yang muncul dari badan pembuat keputusan publik/swasta. *Collaborative governance* adalah pengaturan yang mengatur di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan non-negara atau pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola publik program atau aset (Ansell & Gash, 2007).

Dalam mewujudkan *collaborative governance* terdapat enam kriteria yang harus dipenuhi, antara lain Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2012) dalam Astuti,dkk (2020) menjelaskan proses kollaborasi terdiri dari dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi. Emerson, et. al (2012) menjelaskan lebih dalam terkait dinamika kolaborasi yaitu :

a. Penggerakan Prinsip Bersama

Beberapa hal seperti dialog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah cara mengerakkan prinsip bersama. Di dalamnya terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan pengembangan prinsip-prinsip bersama yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor.

b. Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan penguatan siklus yang terdiri dari elemen kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.

c. Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Yang dimaksud adalah berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas memadai dari aktor.

Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut:

a. Instansi Pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi

Indikator Pemerintah berpartisipasi dalam penerapan ini dapat kategorikan sebagai sebuah dialog tatap muka (Face to face) yang berarti collaborative governance dibangun berdasarkan adanya dialog dari instansi pemerintah maupun dari stakeholders. Dialog ini menjadi sebuah proses yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya saling menguntungkan di dalam kolaborasi yang di bangun.

b. non-pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi

Indikator non-pemerintah yang berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi bisa diawali dengan membangun kepercayaan (Trust Building) yang artinya proses dialog lanjutan antar pemimpin kolaborasi yang harus mampu membangun kepercayaan diantara pemangku kepentingan. Proses membangun kepercayaan ini merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan komitmen tinggi. Dalam hal ini pihak non-pemerintah atau stakeholders berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi perlu di awali dengan adanya rasa kepercayaan satu sama yang lainnya.

c. Organisasi non-pemerintahan punya andil besar dalam proses pembuatan keputusan dalam kolaborasi.

Indikator non-pemerintahan punya andil besar dalam proses keputusan dalam terbentuknya kolaborasi dapat di kaitkan dengan komitmen terhadap proses (Comitment to process) yang artinya adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan yang kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi, dalam hal ini kolaborasi yang dilakukan berkelanjutan dan saling menguntungkan.

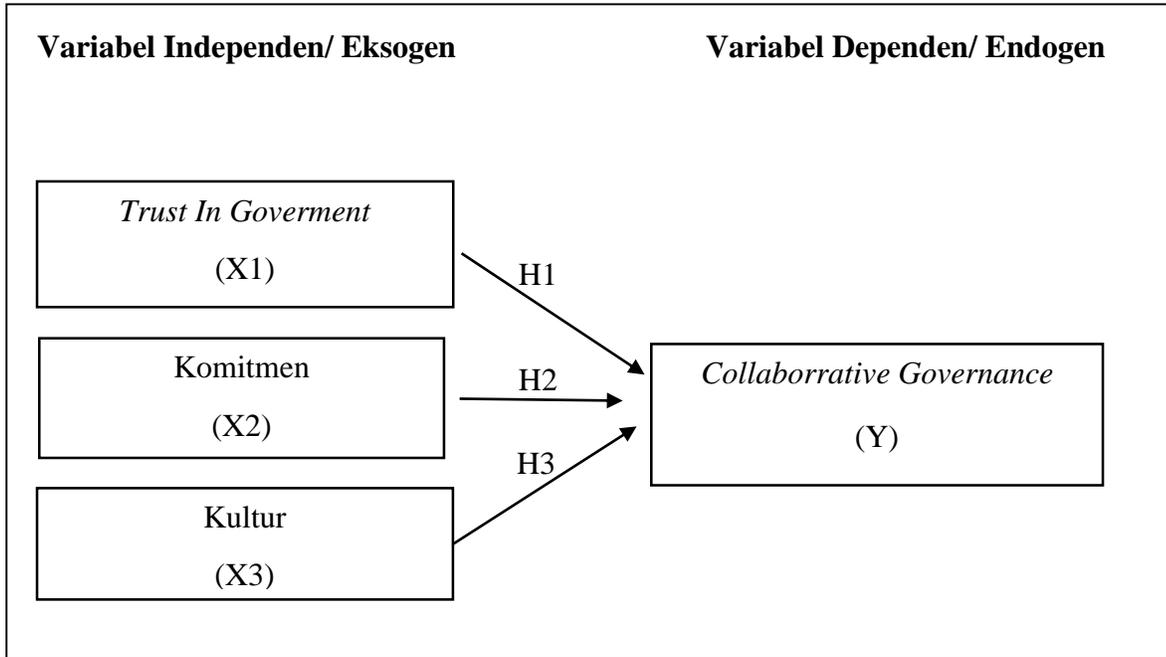
d. Orientasi Pemecah Masalah Publik dalam Kolaborasi

Indikator Orientasi pemecah masalah publik dalam kolaborasi ini sama dnegan rasa saling berbagi pengertian dan pengalaman (Share Understanding) yang artinya pada titik tertentu, pemerintah ataupun stakeholders harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

e. Teknologi Informasi yang digunakan untuk kolaborasi

Indikator Teknologi informasi yang digunakan untuk kolaborasi bisa di kategorikan sebagai Hasil sementara (Outcome) yang artinya kolaborasi ini akan berkelanjutan ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata yang dimana hasilnya dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama baik dari pemerintah dan setiap stakeholders. Teknologi informasi yang digunakan menjadi kebutuhan dalam melakukan komunikasi yang baik.

Gambar. 1.1 Kerangka Teoritik



1.7 Hipotesa

1.7.1 *Trust in government* berpengaruh sangat positif dan signifikan terhadap implementasi collaborative governance Dinas Pariwisata, UMKM, dan Stakeholder dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022.

1.7.2 Komitmen berpengaruh sangat positif dan signifikan terhadap implementasi collaborative governance Dinas Pariwisata, UMKM, dan Stakeholder dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022.

1.7.3 Kultur berpengaruh sangat positif dan signifikan terhadap implementasi collaborative governance Dinas Pariwisata, UMKM, dan Stakeholder dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022.

1.8 Definisi Konsep dan Operasional

1.8.1 Definisi Konsep

1. Kepercayaan Publik

Konsep dari kepercayaan publik merupakan sebuah sikap abstrak yang terbentuk dari hubungan antara pemerintah kepada masyarakat. Dalam penelitian ini kepercayaan publik digunakan untuk mengetahui bagaimana respon atau sikap masyarakat terhadap kebijakan atau keputusan yang dikeluarkan pemerintah.

2. Komitmen

Komitmen adalah emosi yang kuat dan intim dari seseorang untuk bekerja keras demi mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen pada penelitian ini digunakan untuk mengatur bagaimana para pekerja pemerintah menjalankan kerjanya untuk mensukseskan tujuan dari suatu kebijakan

3. *Culture* (Budaya Kerja)

Konsep Kulture merujuk pada sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh karyawan atau pegawai dalam suatu organisasi. Kultur menjadi sebuah alat ukur bagaimana rutinitas atau kebiasaan pegawai pemerintah dalam bekerja.

4. *Collaborative Governance*

Collaborative Governance merupakan pengambilan keputusan publik yang melibatkan non negara atau diluar pemangku kepentingan untuk mengelola atau melaksanakan suatu program.

1.8.2 Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Trust In Government	<ol style="list-style-type: none">1. Pemerintah yang berinteraksi dengan masyarakat.2. Pemerintah merespon kebutuhan Rakyat.3. Pemerintah menyampaikan informasi yang benar.
Komitmen	<ol style="list-style-type: none">1. Emosi yang kuat menjadi bagian dari program kolaborasi2. Kontribusi untuk program kolaborasi3. Partisipasi dalam penyelesaian masalah dalam program kolaborasi
Kultur	<ol style="list-style-type: none">1. Norma Kultural/adat yang mendukung dalam kolaborasi2. Sikap dan perilaku orang Indonesia dalam mendukung kolaborasi
Collaborative Governance	<ol style="list-style-type: none">1. Instansi Pemerintah berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi yang dilakukan.2. Organisasi non-pemerintah yang berpartisipasi dalam penerapan kolaborasi yang dilakukan.3. Organisasi non-pemerintah punya andil besar dalam proses pembuatan keputusan dalam kolaborasi yang dilakukan.4. Orientasi pemecahan masalah publik dalam kolaborasi yang dilakukan.5. Teknologi informasi yang digunakan untuk melakukan kolaborasi yang dilakukan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Dalam upaya mengetahui seberapa jauh collaborative governance yang dilakukan antara stakeholder dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur dan seberapa besar pengaruh trust in government, komitmen, dan kultur terhadap implementasi collaborative governance Dinas Pariwisata, UMKM, dan Stakeholder dalam memajukan UMKM di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Kuantitatif .

Menurut Abdullah (2015) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan mengeneralisasi temuan penelitian sehingga dapat digunakan untuk memprediksi situasi yang sama pada populasi lain (Abdullah, 2015). Penelitian kuantitatif juga digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti. Penelitian kuantitatif dimulai dengan teori dan hipotesis.

Penelitian kuantitatif tidak bisa dilepaskan dari paradigma positivisme, yang mana menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan seperti empirisme, behaviorisme, naturalisme, sainsisme (Abdullah, 2015). Abdullah (2015) juga menjelaskan untuk mencapai hal tersebut penelitian kuantitatif semua obyek penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta yang dapat diamati. Tidak mementingkan fakta sebagai makna, tetapi mementingkan fenomena yang nampak, serta serba bebas nilai (objektif) dengan menentang habis-habisan sikap-sikap subyektif.

1.9.2 Populasi (N) dan Sample (n)

Menurut (Sugiyono, 2018:130) dalam (Imron, 2019) yang menjelaskan bahwa populasi dapat diartikan sebagai wilayah yang tergeneralisasi dan terdiri dari subyek/objek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh seorang peneliti dalam penelitiannya untuk kemudian dipelajari yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Pada penelitian ini populasi dari pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai timur adalah 32 orang, jumlah Stakeholder PT. Kaltim Prima Coal dan UMKM yang menerima pelatihan 113 orang, Berdasarkan data tersebut populasi ini merupakan data real atas penerjuran langsung.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, supaya hasil kesimpulan penelitian dapat digeneralisasikan untuk seluruh populasi, maka sampel yang diambil harus benar-benar representative, bahkan (Sugiyono, 2018) juga menjelaskan sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang ada pada populasi itu dan nantinya akan dijadikan objek dalam pengambilan data penelitian. Dalam penelitian ini penghitungan sample yang diambil dari jumlah keseluruhan pegawai dari dinas pariwisata, stakeholder, dan umkm menggunakan rumus slovin yaitu:

Keterangan :

n : ukuran sampel

N : ukuran populasi

e : persen ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sample perhitungan pengambilan sample menggunakan 10%.

1. Dinas Pariwisata

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{32}{1+32(0,01)}$$

$$n = \frac{32}{1,32} = 24 \text{ orang}$$

2. Stakeholder PT. Kaltim Prima Coal dan UMKM

$$n = \frac{113}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{113}{1+113(0,01)}$$

$$n = \frac{113}{2,13} = 53 \text{ orang}$$

Dari hasil perhitungan jumlah sample yang menggunakan rumus slovin peneliti mendapatkan total sample sebanyak 77 orang, peneliti mendapatkan jawaban dari masing-masing populasi yang akan diambil menggunakan teknik random sampling yang artinya adalah suatu teknik pengambilan sample dari populasi secara acak. Teknik random sampling ini digunakan untuk menentukan sample dari masing-masing populasi yaitu Dinas Pariwisata dan Stakeholder PT. Kaltim Prima Coal dan UMKM sebagai berikut:

1. Dinas Pariwisata dari 32 orang akan diambil 24 orang secara acak.
2. Stakeholder UMKM & PT. Kaltim Prima Coal dari 113 orang akan diambil 53 orang secara acak.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peneliti sebelum melakukan penelitian dilakukan. Observasi yang dilakukan peneliti berupa pengamatan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian yang akan datang di tempat penelitian yakni kabupaten Kutai Timur, tepatnya di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, Kantor PT.KPC, dan beberapa rumah pelaku UMKM.

2. Angket/Kuesioner

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari para responden penelitian, dimana setelah melakukan observasi peneliti akan membagikan kuesioner melalui google form kepada masing-masing kategori yaitu pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai, Pegawai PT.KPC, dan Pelaku UMKM.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini berupa hasil belajar siswa dalam bentuk nilai, foto, dan kelengkapan dokumen lainnya.

1.9.4 Instrumen dan Pengukuran data

Dalam penyusunan instrumen penelitian digunakan model dari Rensis Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan menggunakan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator dan sub indikator (Sugiyono,2012). Adapun skalanya sebagai yaitu :

- 1) Sangat Setuju (memiliki nilai 5)

- 2) Setuju (memiliki nilai 4)
- 3) Netral (memiliki nilai 3)
- 4) Tidak Setuju (memiliki nilai 2)
- 5) Sangat Tidak Setuju (memiliki nilai 1)

1.9.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012) yang dikutip dalam (Ernanda, 2017) teknik analisis data di dalam penelitian merupakan proses pencarian data dari lapangan, serta dokumentasi yang nantinya dapat menjawab hipotesis yang telah dirumuskan dan selanjutnya di analisis dengan metode statistic dalam penelitian kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan SEM-PLS untuk menganalisis datanya. SEM-PLS atau Structure Equational Model-Partial Least Squares. SEM-PLS adalah metode yang memanfaatkan teknologi yakni di operasikannya dengan menggunakan alat atau media komputer. SEM dalam aplikasi untuk menghitung fenomena yang ada di lapangan serta dapat menguji hipotesis atau kebenaran yang sudah diperkirakan, sedangkan PLS pada aplikasi melihat varian yang mana dapat melakukan pengujian seperti halnya pengukuran sekaligus pengujian model pada structural (Juliandi, 2018). SEM-PLS ini dalam penelitian untuk menghitung validitas serta reliabilitas dan menguji regresi dan hipotesis.

Validitas adalah sebuah ketepatan yang dicermati dengan sebuah alat atau instrument dari penelitian untuk mengukur apa saja yang menjadi bahan penelitian dan yang dapat diukur dalam penelitian tersebut (Budiastuti & Bandur, 2018). Reliabilitas adalah faktor atau alat ukur yang digunakan untuk menguji kekonsisten dari pernyataan atau jawaban dari responden dan sangat dipertimbangkan oleh peneliti dalam menganalisis, menyusun dan melaporkan hasil dari penelitiannya, realibilitas akan terus berkaitan dengan validitas

(Aulia, 2021). Menurut Sugiyono dalam (febrianawati, 2018) mengatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas instrument (alat ukur) adalah pengguna alat ukur yang menggunakan pengukuran dan subjek yang diukur.

Uji regresi merupakan satu dari berbagai metode yang digunakan untuk menentukan antar hubungan sebab dan akibat antara beberapa variable dalam penelitian (Darma, 2021). Sedangkan Uji Hipotesis merupakan prosedur pengujian yang bertujuan dalam memutuskan dengan mempertimbangkan kekuatan sample, memberikan landasan serta keputusan pada populasinya apakah nantinya pradugaan dapat diterima atau bahkan ditolak (Tannady & Munardi, 2017)